

## KETERLIBATAN AKTOR DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA PATTONGKO KECAMATAN SINJAI TENGAH KABUPATEN SINJAI

**Sulaiman<sup>1</sup>, Syamsuddin<sup>2</sup>, Sumardi<sup>3</sup>**

Universitas Muhammadiyah Sinjai

[syam.sinjaiku@gmail.com](mailto:syam.sinjaiku@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the form and pattern of actor involvement, the factors influencing it, and strategies to optimize actor involvement in infrastructure development in Pattongko Village, Central Sinjai District, Sinjai Regency. This study adopts a qualitative approach with a case study design. Data collection was carried out through in-depth interviews, participatory observation, and documentation study of the Village Government Work Plan (RKPDes) and the Asset Inventory Card (KIB D) for the 2022–2026 period. Data analysis was based on the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, utilizing triangulation techniques to ensure data validity.*

*The results of the study show that actor involvement has been structured across all stages of development. In the planning stage, a bottom-up planning mechanism and demand-driven governance principles were realized through collaboration among the Village Government, the Village BPD (Village Consultative Body), and the LPMD (Village Community Empowerment Institution) to establish development priority scales for farm roads, neighborhood roads, and public facilities via Village Deliberation (Musdes) and Hamlet Deliberation (Musdus). In the implementation stage, physical construction was executed through pure self-management (swakelola) as a form of collaborative governance and social capital participation, demonstrated through mutual assistance (gotong royong), the provision of local labor, and land donations. In the monitoring stage, the integration of formal oversight by the BPD and community-based social monitoring by residents proved capable of enhancing public accountability and transparency in village fund management. The main supporting factors for actor involvement include transparent village leadership, a culture of mutual assistance, effective communication, and budget transparency. Meanwhile, inhibiting factors include budget constraints, mountainous geographical conditions, and the limited technical capacity of village officials. This study recommends the need to strengthen village institutional capacity and formulate local regulations to ensure sustainable infrastructure maintenance.*

**Keywords** : Actor, Collaborative Governance, Village Infrastructure, Community Participation, Self-Management

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan pola keterlibatan aktor, faktor-faktor yang memengaruhi, serta strategi optimalisasi keterlibatan aktor dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap dokumen RKPDes serta Kartu Inventaris Barang (KIB D) periode 2022–2026. Analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña dengan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktor telah berlangsung secara terstruktur pada seluruh tahapan pembangunan. Pada tahap perencanaan, mekanisme *bottom-up planning* dan prinsip *demand-driven governance* diwujudkan melalui kolaborasi antara Pemerintah Desa, BPD, dan LPMD dalam merumuskan skala prioritas pembangunan jalan usaha tani, jalan lingkungan, serta fasilitas umum via Musdes dan Musdus. Pada tahap pelaksanaan, pengerjaan fisik direalisasikan melalui pola swakelola murni sebagai wujud *collaborative governance* dan partisipasi modal sosial (*social capital*) masyarakat melalui gotong royong, penyediaan tenaga kerja lokal, hingga hibah tanah. Pada tahap pengawasan, integrasi antara pengawasan formal BPD dan pengawasan sosial berbasis komunitas (*community-based monitoring*) oleh warga terbukti mampu meningkatkan akuntabilitas publik dan transparansi pengelolaan dana desa. Faktor pendukung utama keterlibatan aktor meliputi kepemimpinan kepala desa yang terbuka, budaya gotong royong, komunikasi efektif, dan transparansi anggaran. Sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, kondisi geografis perbukitan, serta kapasitas teknis aparatur desa yang masih terbatas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan desa dan penyusunan regulasi lokal untuk menjamin pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan.

**Kata Kunci** : *Aktor, Collaborative Governance, Infrastruktur Desa, Partisipasi Masyarakat, Swakelola*

## PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses multidimensional yang mencakup perubahan-perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional di samping mendorong pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro & Smith, 2015). Dalam konteks Indonesia, pembangunan desa menjadi prioritas strategis yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola pembangunan berdasarkan prakarsa dan kebutuhan masyarakat setempat. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ribuan desa memiliki tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan infrastruktur. Menurut data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, masih terdapat kesenjangan infrastruktur yang signifikan antara

desa-desanya di Indonesia, terutama di kawasan timur (Kemendes PDTT, 2023). Infrastruktur desa yang memadai menjadi prasyarat fundamental bagi terciptanya konektivitas, peningkatan produktivitas ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Dalam perspektif governance, pembangunan infrastruktur tidak lagi dipandang sebagai urusan tunggal pemerintah, melainkan melibatkan berbagai aktor dengan peran dan kepentingan yang beragam. Konsep multi-actor governance menekankan bahwa efektivitas pembangunan sangat ditentukan oleh bagaimana berbagai pemangku kepentingan berinteraksi, bernegosiasi, dan berkolaborasi dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan (Rhodes, 2000; Ansell & Gash, 2008). Keterlibatan aktor yang beragam, mulai dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, hingga sektor swasta, menjadi faktor determinan dalam keberhasilan pembangunan infrastruktur desa. Teori aktor dalam pembangunan dikembangkan oleh Long (2001) yang menekankan bahwa pembangunan tidak berjalan secara linear dari atas ke bawah, melainkan dibentuk oleh interaksi antar aktor yang memiliki kepentingan, pengetahuan, dan kapasitas yang berbeda-beda. Pendekatan aktor-oriented ini relevan untuk memahami dinamika pembangunan infrastruktur desa yang kompleks. Setiap aktor memiliki agency, yakni kemampuan untuk bertindak dan membuat perbedaan dalam konteks sosial tertentu, sehingga keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada bagaimana agency masing-masing aktor dioptimalkan dalam proses kolaborasi.

Participatory development sebagai konsep turunannya menekankan bahwa masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang aktif berpartisipasi dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi (Chambers, 1994; Cornwall, 2008). Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa terbukti meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan hasil-hasil pembangunan. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keterlibatan aktor yang inklusif dalam pembangunan desa menghasilkan outcome yang lebih baik dibandingkan pendekatan top-down yang eksklusif. Studi Susilowati & Prasetyo (2022) di Jawa Tengah menemukan bahwa desa-desa dengan tingkat partisipasi masyarakat tinggi dalam musyawarah desa menunjukkan kualitas infrastruktur yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Demikian pula temuan Wahyudi et al. (2021) yang menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa, BPD, dan kelompok masyarakat sipil

secara signifikan meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur.

Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai merupakan salah satu desa di wilayah pegunungan Sulawesi Selatan yang memiliki potensi sumber daya alam cukup besar, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar. Berdasarkan hasil observasi awal, terdapat beberapa persoalan infrastruktur yang belum tertangani secara optimal, seperti kondisi jalan desa yang belum sepenuhnya memadai, sistem irigasi yang terbatas, dan fasilitas publik yang masih perlu ditingkatkan. Di sisi lain, proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa ini melibatkan berbagai aktor dengan pola keterlibatan yang beragam dan masih belum terstruktur secara optimal. Fenomena tersebut mendorong perlunya penelitian yang secara sistematis mengkaji bagaimana keterlibatan berbagai aktor dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pattongko berlangsung, faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat keterlibatan tersebut, serta model keterlibatan seperti apa yang paling efektif untuk diterapkan. Penelitian ini menjadi penting tidak hanya bagi kepentingan akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi penguatan tata kelola pembangunan infrastruktur di tingkat desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk dan pola keterlibatan aktor dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai? (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keterlibatan aktor dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pattongko? (3) Strategi apa yang dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan keterlibatan aktor dalam pembangunan infrastruktur desa secara berkelanjutan?

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Konsep Aktor dan Pendekatan Actor Oriented**

Konsep aktor dalam kajian pembangunan merujuk pada individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kemampuan bertindak (agency) secara aktif dalam merespons situasi sosial (Long, 2001). Berbeda dengan pendekatan struktural yang memandang masyarakat secara pasif, pendekatan actor-oriented menegaskan bahwa setiap aktor memiliki kapasitas untuk memengaruhi pembangunan berdasarkan kepentingan, pengetahuan, dan sumber daya yang dimilikinya (Long, 2001). Dalam pembangunan desa, aktor diklasifikasikan menjadi

aktor pemerintahan, masyarakat sipil, ekonomi, dan eksternal (Hickey & Mohan, 2004). Teori stakeholder memperkuat kerangka ini dengan menekankan pentingnya pemetaan kepentingan serta dinamika kekuasaan di antara para pemangku kepentingan yang legitimate (Freeman, 1984; Reed et al., 2009).

### **Pembangunan Infrastruktur Desa**

Infrastruktur desa merupakan prasyarat fisik—seperti jalan, jembatan, irigasi, dan sanitasi—untuk mendukung kehidupan sosial-ekonomi warga (PP No. 43 Tahun 2014). Alokasi Dana Desa terbukti secara masif mempercepat ketersediaan fisik infrastruktur perdesaan di Indonesia (Bappenas, 2022). Namun, keberlanjutan hasil pembangunan sangat bergantung pada partisipasi warga dan kapasitas tata kelola lokal. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan (sustainable infrastructure development) menuntut keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui keterlibatan masyarakat dan kearifan lokal (UNESCAP, 2021).

### **Collaborative Governance**

Collaborative governance didefinisikan sebagai paradigma tata kelola publik yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang terstruktur (Ansell & Gash, 2008). Ansell dan Gash (2008) mengidentifikasi bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh kondisi awal (keseimbangan sumber daya dan sejarah hubungan), kepemimpinan fasilitatif, serta desain kelembagaan. Kerangka integratif oleh Emerson et al. (2012) semakin menegaskan bahwa kolaborasi terjadi dalam konteks sistem terbuka yang mempertemukan tata kelola formal, sistem adat, dan jaringan sosial masyarakat.

### **Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**

Partisipasi warga merupakan pilar utama pembangunan yang demokratis. Arnstein (1969) merumuskan Ladder of Citizen Participation untuk mengukur tingkatan partisipasi, mulai dari bentuk non-partisipasi hingga kontrol warga secara penuh. Meskipun Musrenbangdes menjadi forum partisipasi resmi di Indonesia, pelaksanaannya kerap kali masih bersifat formalitas akibat dominasi elite lokal (Pratikno & Lay, 2019). Oleh karena itu, pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) mendorong pemanfaatan pengetahuan lokal (local knowledge) agar perencanaan dan prioritas infrastruktur benar-benar berdasar pada kebutuhan riil masyarakat (Chambers, 1994).

## **Kajian Empiris Terkait**

Sejumlah studi empiris menunjukkan beragam dinamika keterlibatan aktor di tingkat desa. Wahyudi et al. (2021) menemukan bahwa peran BPD dalam pengawasan pembangunan sering kali pasif dan sebatas persetujuan formal. Sebaliknya, Susilowati dan Prasetyo (2022) membuktikan bahwa partisipasi aktif warga dalam perencanaan serta transparansi anggaran berbanding lurus dengan kualitas infrastruktur dan kepuasan publik. Pada ranah internasional, Platteau dan Gaspart (2003) mengingatkan bahaya elite capture yang mendistorsi manfaat pembangunan. Akhirnya, Arif et al. (2023) menegaskan bahwa kepemimpinan kepala desa yang terbuka dan partisipatif merupakan faktor determinan utama dalam menciptakan iklim kolaborasi yang kondusif di desa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi untuk menangkap kompleksitas dan kontekstualitas fenomena keterlibatan aktor dalam pembangunan infrastruktur desa secara mendalam (Yin, 2018). Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kapasitas informasi, relevansi, dan aksesibilitas. Informan kunci yang terlibat meliputi Kepala Desa Pattongko, Perangkat Desa (Sekretaris Desa dan Kepala Seksi terkait), Ketua dan Anggota BPD, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD dan PKK), tokoh masyarakat/adat/agama, perwakilan kelompok masyarakat (pemuda, perempuan, dan kelompok rentan), serta perwakilan pemerintah Kecamatan Sinjai Tengah.

Pengumpulan data primer dan sekunder dilaksanakan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam secara semi-terstruktur untuk mengeksplorasi persepsi dan pengalaman informan terkait pola keterlibatan aktor pada seluruh tahapan pembangunan. Kedua, observasi partisipatif terhadap kondisi fisik infrastruktur, dinamika musyawarah desa, dan interaksi antar-aktor yang dicatat dalam catatan lapangan. Ketiga, studi dokumentasi dengan menelaah dokumen resmi desa, seperti RPJMDes, RKPDes, APBDes, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), serta Kartu Inventaris Barang (KIB D). Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang mencakup empat tahapan berkesinambungan: pengumpulan data, kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (conclusion drawing).

and verification). Untuk menjamin kredibilitas dan keabsahan data, penelitian ini mengoperasionalkan teknik triangulasi (sumber, teknik/metode, dan teori) serta melakukan member checking dengan mengonfirmasi kembali hasil interpretasi data kepada informan kunci.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Pembangunan infrastruktur di Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai menunjukkan bentuk keterlibatan aktor yang terstruktur pada setiap tahapan kegiatan, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Berdasarkan kondisi geografis dan topografisnya, Desa Pattongko merupakan daerah perbukitan dan perkebunan dengan ketinggian 500 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini menjadikan pembangunan prasarana jalan, jaringan irigasi, dan fasilitas umum sebagai kebutuhan dasar warga. Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2025, Pemerintah Desa Pattongko mengelola total anggaran belanja sebesar Rp2.423.563.190,00, dengan alokasi khusus untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp810.841.190,00. Berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB D) Jalan, Irigasi, dan Jaringan, realisasi akumulatif fisik infrastruktur yang berhasil dibangun dalam rentang tahun 2022 hingga 2026 mencakup nilai total perolehan sebesar Rp1.021.872.766,00 yang bersumber dari Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

### **Keterlibatan Aktor dalam Tahap Perencanaan**

Pada tahap perencanaan, Keterlibatan aktor berlangsung melalui mekanisme musyawarah kelembagaan desa yang bersifat partisipatif. Pemerintah Desa Pattongko yang dipimpin oleh Kepala Desa (Sulaiman) bersama perangkat teknis, seperti Kepala Urusan Perencanaan (Sirman) dan Kepala Seksi Kesejahteraan (Muhammad Ilham Nurdin), bertugas merumuskan draft usulan program. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diketuai oleh Muhammad Sattar berperan memfasilitasi penyerapan aspirasi dari tingkat bawah melalui Musyawarah Desa (Musdes) reguler dengan alokasi anggaran Rp9.895.000,00 serta Musyawarah Dusun (Musdus) atau Rembug Desa non-reguler sebesar Rp13.239.000,00. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) di bawah kepemimpinan Ruslam Syam bersama para Kepala Dusun

dan Ketua RT/RW mengidentifikasi kebutuhan pembangunan di lima wilayah dusun, yaitu Dusun Sompong, Manubbu, Tapillasa, Karoppa, dan Tangkulu. Dari proses musyawarah tersebut, dirumuskan skala prioritas pembangunan yang meliputi jalan lingkungan, jalan usaha tani, jembatan, sarana air bersih, fasilitas pendidikan, hingga prasarana olahraga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan diawali melalui Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes). Pemerintah Desa Pattongko Kec. Sinjai Tengah berperan sebagai penyusun program pembangunan berdasarkan usulan masyarakat, sedangkan BPD berfungsi menyalurkan aspirasi dan memastikan kebutuhan masyarakat terakomodasi. Masyarakat menyampaikan usulan pembangunan seperti peningkatan jalan tani, pembangunan drainase, rehabilitasi irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Forum musyawarah menjadi media utama dalam membangun kesepakatan mengenai prioritas pembangunan. Temuan ini menunjukkan bahwa pola perencanaan telah mengarah pada prinsip partisipatif sebagaimana dijelaskan dalam teori Actor-Oriented Approach oleh Long (2001), yang memandang setiap aktor memiliki kemampuan (agency) dalam memengaruhi proses pembangunan.

### **Keterlibatan Aktor dalam Pelaksanaan Pembangunan**

Pada tahap pelaksanaan, seluruh pengerjaan fisik infrastruktur desa direalisasikan menggunakan pola swakelola murni tanpa melibatkankolaborasi pihak ketiga atau kontraktor swasta. Rincian rekam jejak pembangunan fisik yang terekam dalam KIB D mencakup berbagai proyek strategis di lima dusun. Pada kurun waktu 2022–2023, telah diselesaikan pemeliharaan bak penampungan air di Dusun Tapillasa (Rp28.478.500,00), perkerasan jalan beton Jalan Batu Bicara (Rp11.500.000,00), Jalan Balleanging (Rp87.089.500,00), Jalan Lingkar Tangkulu (Rp69.043.500,00), Jalan Asae Karoppa (Rp53.431.000,00), dwiker di Dusun Sompong (Rp6.540.250,00), jembatan jalan tani Bonjeng (Rp24.465.000,00), serta jalan tani Karampuang dan Tonronge (total Rp129.969.700,00). Pembangunan berlanjut pada tahun 2024 dengan pembuatan Talud Lapangan Desa di Dusun Manubbu senilai Rp212.495.000,00. Selanjutnya pada periode 2025–2026, realisasi fisik mencakup lanjutan beton Jalan Balleanging (Rp62.111.000,00), Jalan Lingkar Tangkulu (Rp63.242.000,00), Jalan Asae Karoppa (Rp54.940.000,00), jembatan jalan tani Karampuang (Rp44.172.500,00), perbaikan Jalan Tani Bonjeng dan Tonrongia (masing-masing Rp41.856.500,00), pemasangan

dwiker dan gorong-gorong di beberapa titik, serta pembuatan Talud Pasar Desa di Jalan Matoadido senilai Rp48.730.000,00 yang memanfaatkan hibah tanah warga. Pelaksanaan kegiatan di lapangan dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA), dengan dukungan tenaga kerja, gotong royong, dan swadaya material dari masyarakat serta keterlibatan Karang Taruna, Kelompok Tani, dan Forum Pemuda Peduli Desa (FPPD).

Pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa bertindak sebagai koordinator pelaksanaan pembangunan melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Pemerintah bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran, administrasi, dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RKPDDes. Masyarakat berpartisipasi melalui kegiatan gotong royong, penyediaan tenaga kerja lokal, serta memberikan dukungan terhadap kelancaran pembangunan. Tokoh masyarakat berperan menjaga komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga potensi konflik dapat diminimalkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak lagi bersifat top-down, melainkan telah melibatkan masyarakat sebagai mitra pembangunan.

### **Keterlibatan Aktor dalam Pengawasan**

Pada tahap pengawasan, fungsi kontrol dilakukan secara formal maupun non-formal. BPD menjalankan pengawasan formal-institusional terhadap kesesuaian volume pekerjaan, spesifikasi fisik, dan realisasi anggaran APBDDes dengan dukungan operasional BPD dari ADD sebesar Rp16.500.000,00. Sementara itu, LPMD bersama masyarakat umum menjalankan pengawasan sosial (social control) secara langsung di lokasi pengerjaan guna memastikan hasil pembangunan sesuai dengan kesepakatan awal dan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pengawasan pembangunan dilakukan secara formal maupun informal. Secara formal, BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan penggunaan Dana Desa. Pemerintah kecamatan melakukan monitoring sebagai bentuk pembinaan kepada pemerintah desa. Di sisi lain, masyarakat melakukan pengawasan sosial dengan mengamati kualitas pekerjaan dan menyampaikan kritik maupun saran apabila ditemukan ketidaksesuaian. Pola pengawasan tersebut mencerminkan adanya mekanisme akuntabilitas publik yang memperkuat transparansi pembangunan.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat dalam ketelibatan aktor**

Keterlibatan aktor dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pattongko didorong oleh beberapa faktor pendukung utama. Kepemimpinan kepala desa yang terbuka dan partisipatif menjadi krusial dalam menciptakan ruang komunikasi, menyatukan kepentingan antar-lembaga, serta menumbuhkan rasa memiliki (\*sense of ownership\*) masyarakat. Hal ini diperkuat oleh budaya gotong royong sebagai modal sosial warga yang direalisasikan melalui sumbangan tenaga, pemikiran, hingga material lokal. Selain itu, komunikasi inter-lembaga yang efektif, transparansi pengelolaan Dana Desa, serta pemanfaatan Forum Musyawarah Desa (Musdes) sebagai wadah penyaluran aspirasi yang inklusif turut meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas publik dalam setiap proses pembangunan.

Di sisi lain, proses keterlibatan aktor juga diperhadapkan pada sejumlah faktor penghambat. Keterbatasan anggaran desa mengakibatkan tidak semua usulan pembangunan fisik masyarakat dapat direalisasikan secara simultan. Faktor geografi perbukitan dan medan yang berat kerap menyulitkan distribusi material serta proses pengawasan teknis di lapangan. Hambatan ini diperberat oleh masih adanya partisipasi pasif dari sebagian warga, dinamika perbedaan kepentingan prioritas antar-kelompok (seperti kebutuhan jalan tani versus drainase permukiman), serta kapasitas teknis aparatur desa yang masih terbatas dalam manajemen proyek dan regulasi pembangunan.

### **PEMBAHASAN**

Proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pattongko terbukti mengedepankan pendekatan bottom-up planning melalui ruang deliberatif yang inklusif. Pengalokasian anggaran khusus dalam RKPDes untuk penyelenggaraan Musdes dan Musdus menegaskan komitmen Pemerintah Desa Pattongko dalam memfasilitasi partisipasi warga. Dalam perspektif ilmu Administrasi Publik, dominasi usulan fisik berupa pembukaan dan perkerasan jalan usaha tani serta pembuatan drainase yang bersumber dari tingkatan RT/RW merefleksikan konsep demand-driven governance. Artinya, kebijakan pembangunan yang dihasilkan murni berorientasi pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat perdesaan yang bermata pencaharian dominan di sektor pertanian dan perkebunan. BPD dan LPMD berhasil menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan warga secara optimal, sehingga

dokumen RKPDes bukan sekadar instrumen administratif formal, melainkan representasi dari konsensus publik.

Penggunaan pola swakelola secara menyeluruh pada proyek pembangunan fisik periode 2022–2026 menegaskan berjalannya praktik collaborative governance dan pemanfaatan modal sosial (social capital) di tingkat lokal. Keputusan untuk tidak menyerahkan pengerjaan proyek kepada pihak ketiga (kontraktor) menempatkan warga desa bukan sekadar sebagai sasaran atau objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang terlibat langsung (co-producer) dalam penyediaan infrastruktur publik. Keterbatasan kemampuan anggaran desa yang terekam pada RKPDes berhasil diimbangi dengan mobilisasi modal sosial berupa tradisi gotong royong, kesadaran swadaya murni, hingga keikhlasan warga dalam memberikan hibah tanah untuk pembangunan talud pasar. Kehadiran organisasi lokal seperti Kelompok Tani, Karang Taruna, dan Forum Pemuda Peduli Desa (FPPD) sebagai elemen pelaksana pengerjaan fisik turut menumbuhkan rasa memiliki (sense of ownership) yang kuat terhadap hasil pembangunan yang bernilai lebih dari Rp1 miliar tersebut.

Sistem pengawasan yang diterapkan di Desa Pattongko mempertemukan fungsi checks and balances formal oleh BPD dengan pengawasan berbasis komunitas (community-based monitoring) yang dipelopori oleh LPMD dan warga sekitar. Pengerjaan proyek yang bersifat swakelola dan terbuka memungkinkan masyarakat secara langsung mengamati kualitas material serta ketebalan konstruksi beton di lapangan. Berdasarkan teori Administrasi Publik, pola pengawasan partisipatif ini sangat efektif dalam menekan potensi asymmetrical information maupun principal-agent problem dalam pengelolaan keuangan desa. Keterlibatan aktif aktor dari tahap perencanaan hingga pengawasan pada akhirnya menjadi jaminan utama bagi terwujudnya akuntabilitas publik, sekaligus menciptakan fondasi bagi keberlanjutan (sustainability) pemeliharaan fisik infrastruktur di Desa Pattongko dalam jangka panjang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Pattongko telah menerapkan prinsip Collaborative Governance melalui keterlibatan pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan warga dalam seluruh tahapan pembangunan. Kolaborasi ini diwujudkan melalui forum musyawarah, pelaksanaan gotong royong, serta mekanisme pengawasan bersama. Berdasarkan teori Ansell dan Gash (2008), keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh dialog tatap muka, komitmen bersama, kepercayaan, dan kepemimpinan fasilitatif. Dalam konteks Desa Pattongko, kepemimpinan kepala desa menjadi

faktor penting yang mendorong komunikasi antarpemangku kepentingan sehingga keputusan pembangunan lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Namun demikian, penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Sebagian masyarakat masih bersifat pasif dan hanya terlibat pada tahap pelaksanaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih berada pada level *partnership* menurut tangga partisipasi Arnstein, karena masyarakat telah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, tetapi kewenangan strategis masih didominasi pemerintah desa. Model keterlibatan aktor yang dihasilkan dalam penelitian ini menempatkan pemerintah desa sebagai koordinator utama, BPD sebagai lembaga representatif dan pengawas, sedangkan masyarakat menjadi mitra pembangunan yang aktif sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Model ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada sinergi, transparansi, dan akuntabilitas seluruh aktor yang terlibat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa keberhasilan keterlibatan aktor dalam pembangunan infrastruktur dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kepemimpinan kepala desa, komunikasi antaraktor, transparansi, dan kapasitas aparatur desa. Sementara itu, faktor eksternal mencakup budaya gotong royong masyarakat, kondisi geografis, keterbatasan anggaran, serta dinamika kepentingan masyarakat. Sinergi antara faktor-faktor pendukung dan upaya mengatasi faktor-faktor penghambat akan menentukan efektivitas penerapan *collaborative governance* dalam pembangunan infrastruktur desa.

## KESIMPULAN

Pembangunan infrastruktur di Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai telah berlangsung secara terstruktur dan partisipatif melingkupi seluruh tahapan kegiatan. Pada tahap perencanaan, mekanisme *bottom-up planning* dan prinsip *demand-driven governance* terefleksikan melalui kolaborasi Pemerintah Desa, BPD, dan LPMD dalam menjaring aspirasi warga via Musdes dan Musdus guna merumuskan skala prioritas infrastruktur pertanian dan fasilitas publik. Tahap pelaksanaan mengoptimalkan *collaborative governance* dan modal sosial (*social capital*) melalui pengerjaan swakelola murni yang melibatkan gotong royong warga, penyediaan tenaga kerja lokal, hingga hibah tanah. Sementara itu, tahap pengawasan berhasil mengintegrasikan kontrol formal BPD dan

pengawasan sosial berbasis komunitas oleh warga, sehingga memperkuat transparansi, menekan penyimpangan anggaran (*principal-agent problem*), dan menjamin keberlanjutan fungsi infrastruktur desa.

Untuk menjaga keberlanjutan hasil pembangunan, Pemerintah Desa Pattongko disarankan untuk mempertahankan skema swakelola partisipatif, menyempurnakan penataan kearsipan aset inventaris desa (KIB D), serta mengalokasikan anggaran khusus pemeliharaan rutin (*routine maintenance*). BPD dan LPMD diharapkan menyusun petunjuk teknis pengawasan partisipatif serta mengintensifkan pelatihan manajemen proyek bagi pengurus RT/RW dan pemuda. Sementara bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji analisis dampak sosio-ekonomi (*impact assessment*) keberadaan jalan usaha tani terhadap kesejahteraan petani atau dinamika resolusi konflik dalam penggalangan swadaya dan hibah tanah warga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arif, M., Badaruddin, & Nasution, I. (2023). Kepemimpinan Kepala Desa dan Tata Kelola Pembangunan Desa di Kabupaten Bone. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 145–162.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Bappenas]. (2022). Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2022. Bappenas.
- Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience. *World Development*, 22(9), 1253–1268. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90003-5](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90003-5)
- Cornwall, A. (2008). Unpacking 'participation': Models, meanings and practices. *Community Development Journal*, 43(3), 269–283. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsn010>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman Publishing.
- Hickey, S., & Mohan, G. (Eds.). (2004). *Participation: From Tyranny to Transformation? Exploring New Approaches to Participation in Development*. Zed Books.

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi [Kemendes PDTT]. (2023). Laporan Kinerja Kementerian Desa PDTT Tahun 2022. Kemendes PDTT.
- Long, N. (2001). *Development Sociology: Actor Perspectives*. Routledge.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Platteau, J. P., & Gaspart, F. (2003). The risk of resource misappropriation in community-driven development. *World Development*, 31(10), 1687–1703. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00138-4](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00138-4)
- Pratikno, & Lay, C. (2019). *Politik Desa: Dinamika dan Tantangan Otonomi Desa di Era Reformasi*. Gadjah Mada University Press.
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933–1949. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>
- Rhodes, R. A. W. (2000). Governance and public administration. In J. Pierre (Ed.), *Debating Governance* (pp. 54–90). Oxford University Press.
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 7(1), 84–85.
- Susilowati, D., & Prasetyo, A. B. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa berbasis dana desa di Kabupaten Klaten. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 88–103. <https://doi.org/10.31289/jiap.v10i1.5012>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Pearson Education.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- UNESCAP. (2021). *Sustainable Infrastructure in Asia and the Pacific: Status, Gaps and Recommendations*. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.
- Wahyudi, A., Syamsul, A., & Rahmawati, D. (2021). Efektivitas kelembagaan BPD dalam pengawasan pembangunan infrastruktur desa di Sulawesi Selatan. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 25(1), 67–84. <https://doi.org/10.22146/jkap.62801>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.